

PENGARUH DAU, DAK FISIK DAN PAD TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Herlambang Febriyanto
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat
mularkawih@gmail.com

Abstract

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:
25 Mei 2022

Tanggal Revisi:
3 Juni 2022

Tanggal Diterima:
7 Oktober 2022

Publikasi On line:
16 Nopember 2022

The state carries out various policies to materialize people's welfare, including through decentralization fund schemes such as General Allocation Fund and Physical Special Allocation Fund to local governments. In addition to receiving decentralization fund, local government also have Original Local Government Revenue as a funding source to improve regional and community quality. Human development is one of the important aspects that determine the nation's progress and is measured through the Human Development Index. The objective of this study was to examine the influence of DAU, Physical DAK and PAD on the level of human development in 14 districts in West Kalimantan Province for the 2017-2020 period. The research used quantitative method, secondary data were derived from BPS, while decentralized fund and PAD data were obtained from GFS reports. The analysis results of this study revealed that the accumulation of DAU, Physical DAK and PAD has a significant impact on the development of human quality. Human development was not significantly affected by DAU and Physical DAK when viewed from a separate aspect, while PAD has a significant effect. Based on these results, it is necessary to optimize the utilization of decentralized fund and PAD to improve the quality of human resources.

Key Words: decentralization fund, General Allocation Funds, Physical Special Allocation Funds, Original Local Government Revenue, Human Development Index

Abstrak

Negara menjalankan berbagai kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, diantaranya melalui skema pemberian dana desentralisasi seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik kepada pemerintah daerah. Selain menerima dana desentralisasi, pemerintah daerah juga mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendanaan untuk meningkatkan kualitas daerah maupun masyarakatnya. Pembangunan manusia merupakan salah satu aspek penting yang menentukan kemajuan suatu bangsa dan diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAU, DAK Fisik dan PAD terhadap tingkat kemajuan pembangunan manusia pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana data sekunder diperoleh dari BPS, sedangkan data dana desentralisasi dan PAD didapatkan dari laporan GFS Kementerian Keuangan. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa akumulasi DAU, DAK Fisik dan PAD memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan kualitas manusia. Pembangunan manusia tidak dipengaruhi secara signifikan oleh DAU dan DAK Fisik bila ditinjau dari aspek yang terpisah, sedangkan PAD cukup memberikan pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan optimalisasi pemanfaatan dana desentralisasi dan PAD untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

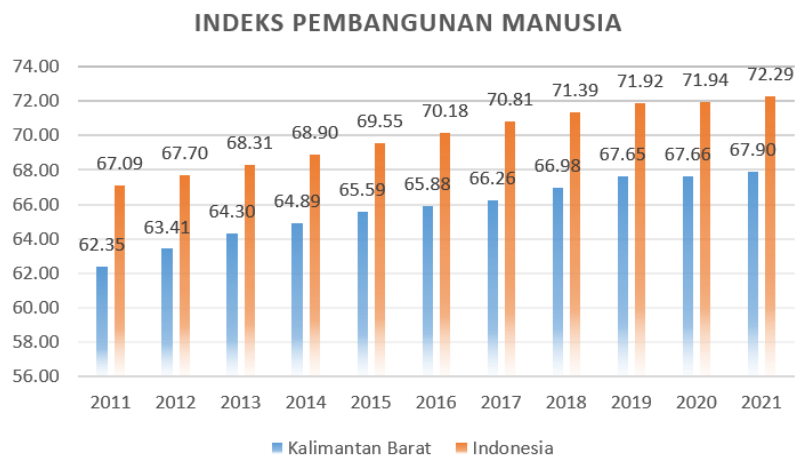
Key Words: Dana desentralisasi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

PENDAHULUAN

Dalam rangka memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberikan DAU kepada pemerintah daerah dengan tujuan memberikan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya masing-

masing (JDIH, 2017). Pengalokasian DAU dihitung berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar pada masing-masing daerah. Ketentuan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (DJPB, 2021). Pemerintah pusat memberikan dana tersebut ke semua pemerintah daerah di wilayah Indonesia. Seluruh pemerintah daerah yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang berjumlah 14 kabupaten dan kota menerima DAU dan DAK FISIK yang jumlahnya bervariasi setiap daerahnya. Jumlah DAU dan DAK Fisik yang diberikan tersebut cenderung meningkat setiap tahunnya sehingga pemerintah pusat berharap agar ketimpangan yang terjadi antara daerah yang kurang berkembang dengan daerah yang sudah maju dapat semakin diminimalisir. Disamping menerima DAU dan DAK Fisik dari APBN, Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat juga menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jumlahnya masih rendah bila dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Ini berarti pemerintah daerah masih belum bisa membiayai kebutuhannya sendiri dan masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Grafik 1.
Indeks Pembangunan Manusia



Sumber: BPS, 2022

Wilayah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai luas sebesar 147.307 km² yang terbagi atas 14 kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk sebanyak 5,41 juta jiwa pada tahun 2020 (BPS Provinsi Kalbar, 2021). Sementara dalam konteks pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011-2021 menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya meskipun masih dibawah rata-rata IPM Nasional (Grafik 1). IPM diukur berdasarkan 3 komponen dasar yaitu umur panjang dan sehat, tingkat pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Penelitian sebelumnya menyatakan adanya PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM Pemerintah Provinsi se-Indonesia, termasuk di Papua Barat (Sarkoro dan Zulfikar, 2016; Hobrouw dan Suaryana, 2021), namun penelitian lain menyatakan tidak ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dengan IPM (Riviando dan Agustin, 2019; Patadang dkk., 2021). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara PAD dengan kualitas pembangunan masyarakat bisa berbeda di setiap wilayah. Sejauh ini, belum ada pengujian terkait korelasi antara dana DAU, DAK Fisik dan PAD dengan IPM di wilayah Kalimantan Barat. Penelitian tentang hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Kualitas Pembangunan Manusia telah dilakukan sebelumnya di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014-2017 (Sembiring, 2020). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, namun Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif. Hal ini menunjukkan besarnya alokasi dana desentralisasi yang diterima oleh pemerintah daerah belum menjamin peningkatan kualitas pembangunan masyarakat. Penelitian ini menentukan tingkat kesejahteraan dari sisi pendidikan, kesehatan maupun ekonomi untuk melihat kualitas

pembangunan manusia. Pengujian dengan melibatkan indikator lain yang berkaitan dengan indeks pembangunan manusia masih perlu dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar dampak dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah DAU, DAK Fisik dan PAD terhadap keberhasilan pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa efektif pemberian dana desentralisasi oleh pemerintah pusat yang dibarengi dengan pemanfaatan PAD sehingga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan strategis pembangunan kualitas sumber daya manusia.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAU merupakan salah satu pelaksanaan program desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan oleh Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil perhitungan yang ditetapkan dengan ketetapan Presiden. Besaran DAU yang semakin meningkat menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin turun (Harjito et al., 2020).

Dana Alokasi Khusus Fisik

Penelitian (Wulan Sari & Halim, 2018) menyatakan pengalokasian DAK Fisik mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, percepatan penyediaan infrastruktur di daerah, sinkronisasi pendanaan pembangunan daerah dan berbasis kinerja penyerapan. Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK Fisik digolongkan menjadi 3 jenis yaitu DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Afirmasi. Proses pencairan DAK Fisik tergolong mudah dan cepat. Pemerintah daerah melakukan pencairan DAK Fisik ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terdekat yang menjadi mitra kerjanya. (Setiowati et al., 2022) berpendapat bahwa koordinasi rutin yang dilakukan Pemda dengan KPPN dapat meningkatkan kinerja pengelolaan DAK Fisik.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Santosa et al., 2005) Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah tersebut. Semakin besar nilai PAD dibandingkan nilai dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dan jumlah kebutuhan belanja daerah tersebut maka semakin mandiri daerah tersebut dalam mencukupi kebutuhannya. PAD sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Semakin besar penerimaan yang didapat dari sumber-sumber tersebut, semakin besar pula PAD yang diterima, sebaliknya semakin kecil penerimaan dari sumber-sumber tersebut maka semakin kecil PAD yang diperoleh (Putri, 2015). Pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dalam memaksimalkan PAD yang diterima (de Fretes, 2017).

Indeks Pembangunan Manusia

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya sehingga tujuan akhir pembangunan harus difokuskan pada manusia (BPS Kab.Sintang, 2021). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup (BPS Kab. Sintang, 2021). Komponen dasar tersebut yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak atau biasa disebut juga indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks standar hidup.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Komponen umur panjang dan hidup sehat atau juga disebut angka harapan hidup dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan suatu masyarakat (Sembiring, 2020). Rumus yang digunakan oleh BPS untuk menghitung komponen tersebut adalah sebagai berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Indeks kesehatan dihitung dari nilai Angka Harapan Hidup dikurangi Angka Harapan Hidup Minimal dibagi dengan nilai Angka Harapan Hidup Maksimal dikurangi Angka Harapan Hidup Minimal. Angka Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (BPS, 2017). Indeks Harapan Hidup diartikan sebagai jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati oleh penduduk di suatu wilayah. Angka Harapan Hidup dapat mengindikasikan tingkat kesehatan suatu masyarakat yang dihitung dari hasil sensus serta survei kependudukan. Indeks Pendidikan menggunakan variabel Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah dalam rumus perhitungannya sebagaimana berikut ini:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$$

Harapan Lama Sekolah diartikan sebagai lamanya seorang anak diharapkan dapat bersekolah pada umur tertentu di masa mendatang yang diamati dari penduduk dengan usia tujuh tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah mampu mencerminkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang tampak dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh setiap anak. Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dengan asumsi kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Penduduk yang dilibatkan dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk dengan usia diatas 25 tahun (BPS, 2017).

Indeks standar hidup dihitung menggunakan indeks pengeluaran untuk mengetahui kelayakan standar hidup di masyarakat. Data indikator pengeluaran yang digunakan adalah data Pengeluaran Per Kapita (Produk Nasional Bruto Per Kapita). Pendapatan per kapita umumnya digunakan untuk menilai daya beli masyarakat. Semakin tinggi pendapatan per kapita maka daya beli masyarakat juga semakin tinggi (Mangkoesobroto, 1991). Tingginya pendapatan menyebabkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik. Di Indonesia variabel PNB lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding dengan pengeluaran perkapita.

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan dari daerah tergantung pada kemampuan daerah merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang dapat menyebabkan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. PAD memiliki peran yang penting dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. PAD diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akan berdampak pada tingginya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Lestari dkk. (2016) menyatakan bahwa PAD yang tinggi dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah atas belanja modal dan memberikan efek yang positif pada DAU. Penelitian Sembiring (2020) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Masyarakat adalah PAD. Hasil penelitian membuktikan bahwa PAD, DAU, dan DAK Fisik Periode 2016-2018 di Provinsi Sumatera Utara secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah sebagai berikut.

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Umum diberikan oleh pemerintah pusat untuk menurunkan kesenjangan fiskal antar daerah sehingga terjadi pemerataan pembangunan di setiap daerah. DAU dapat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daerah yang diorientasikan untuk memperbaiki kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mengelola dana ini dengan optimal dan mengalokasikan untuk membiayai pengeluaran daerah, terutama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. DAU bersifat "Block Grant", yaitu penggunaannya diserahkan kepada daerah untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah sehingga terjadi peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian Badrudin dan Khasanah (2012) menunjukkan bahwa DAU di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh positif pada IPM. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian Irwanti (2014) yang menyatakan IPM dipengaruhi oleh DAU secara positif. Sesuai dengan uraian tersebut, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut.

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Khusus diperlukan untuk memberikan pembiayaan fasilitas publik yang ada di daerah kota/kabupaten sehingga dapat mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Jika dilihat, sebagian besar pengeluaran dari DAK dialokasikan untuk belanja modal. Peningkatan belanja modal secara tepat akan mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia di berbagai bidang, seperti kesehatan, sosial, pendidikan, maupun pelayanan umum. Penelitian Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Ulupui (2015) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah sebagai berikut.

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengolahan data panel melalui uji regresi. Variabel – variabel data panel yang digunakan antara lain data DAU, DAK Fisik, PAD dan data pembentuk IPM. Data pembentuk IPM terdiri dari Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita. Rumus pengujian regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{AHH} &= \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e \\ \text{HLS} &= \alpha + \beta_4 X_{1it} + \beta_5 X_{2it} + \beta_6 X_{3it} + e \\ \text{RLS} &= \alpha + \beta_7 X_{1it} + \beta_8 X_{2it} + \beta_9 X_{3it} + e \\ \text{P} &= \alpha + \beta_{10} X_{1it} + \beta_{11} X_{2it} + \beta_{12} X_{3it} + e \end{aligned}$$

Formulasi dapat diinterpretasikan bahwa AHH menunjukkan Angka Harapan Hidup. HLS adalah Harapan Lama Sekolah, RLS adalah Rata-rata Lama Sekolah, P adalah Pengeluaran Per Kapita, DAU (X1) adalah dana alokasi umum. DAK Fisik (X2) adalah dana alokasi khusus fisik, PAD (X3) adalah Pendapatan Asli daerah, i adalah menunjukkan Kab/kota, t menunjukkan waktu dan e adalah error term. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data komponen penyusun IPM yang diperoleh dari BPS dan data DAU, DAK Fisik dan PAD yang terdapat dalam laporan GFS Kementerian Keuangan rentang waktu 2017-2020. *Tools* yang digunakan untuk melakukan analisis data adalah SPSS. Metode pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan uji F, uji t serta koefisien determinasi.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, dapat kita lihat bahwa hasil yang ditampilkan adalah *Summary Output* berupa *Regression Statistics* yang menggambarkan keterkaitan hubungan antara *dependent variable* dengan *independent variable* dan Tabel Anova yang menampilkan sudut pandang statistik dari sisi keragaman.

Model Summary				
Model	R	R square	Adjusted R square	Std. Error of the Estimate
1	.873 ^a	.762	.748	957.07314

a. Predictors: (Constant), PADx3, DAUx1, DAKx2

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean square	F	Sig.
1	Regression	1.522E8	3	5.073E7	55.379	.000 ^a
	Residual	4.763E7	52	915988.999		
	Total	1.998E8	55			

a. Predictors: (Constant), PADx3, DAUx1, DAKx2

b. Dependent Variable: PY

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1.(Constant)	8842.068	509.444			17.356	.000
DAUx1	-3.086E-9	.000	-.320		-2.493	.016
DAKx2	5.580E-11	.000	.003		.025	.980
PADx3	1.685E-8	.000	.922		12.346	.000

a. Dependent Variable: PY

Data Diolah, 2022

Penjelasan atas hasil analisa data pada Tabel 1 diatas, ditunjukkan oleh hasil Uji F, Uji t dan Uji Koefisien Determinasi sebagaimana tabel-tabel dibawah ini

Tabel 2.
Uji F

Komponen	Significance F	Keterangan
Angka Harapan Hidup	0.684	Tidak Signifikan
Harapan Lama Sekolah	0.000	Signifikan
Rata-rata Lama Sekolah	0.000	Signifikan
Pengeluaran Per Kapita	0.000	Signifikan

Data Diolah, 2022

Hasil Uji F memperlihatkan bahwa DAU, DAK Fisik dan PAD hasilnya tidak signifikan terhadap Angka Harapan Hidup namun sebaliknya signifikan terhadap Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita. Dua komponen pembentuk IPM yaitu Indeks Pendidikan dan Indeks Standar Hidup cukup dipengaruhi sedangkan Indeks Kesehatan tidak dipengaruhi secara signifikan.

Tabel 3.
Uji t

Hasil 1 (AHH)	t	Keterangan
DAU(x1)	-0.372	Tidak Signifikan
DAK(x2)	-0.294	Tidak Signifikan
PAD(x3)	0.276	Tidak Signifikan
Hasil 2 (HLS)	t	Keterangan
DAU(x1)	0.475	Tidak Signifikan
DAK(x2)	-2.407	Tidak Signifikan
PAD(x3)	2.117	Signifikan
Hasil 3 (RLS)	t	Keterangan
DAU(x1)	3.291	Signifikan
DAK(x2)	-6.145	Tidak Signifikan
PAD(x3)	6.231	Signifikan
Hasil 4 (P)	t	Keterangan
DAU(x1)	-2.493	Tidak Signifikan
DAK(x2)	0.025	Tidak Signifikan
PAD(x3)	12.346	Signifikan

Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil Uji t pada tabel diatas diperoleh hasil bahwa DAU dan DAK Fisik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap seluruh komponen pembentuk IPM karena semua hasilnya masih dibawah taraf nyata yang ditetapkan sebesar 5%. PAD menghasilkan nilai yang signifikan terhadap Pengeluaran Per Kapita dan Rata-rata Lama Sekolah namun tidak signifikan pengaruhnya terhadap Angka Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah.

Tabel 4.
Uji Koefisien Determinasi

Komponen	Adjusted R Square	Keterangan
Angka Harapan Hidup	-0.026	Tidak Signifikan
Harapan Lama Sekolah	0.422	Signifikan
Rata-rata Lama Sekolah	0.404	Signifikan
Pengeluaran Per Kapita	0.748	Signifikan

Data Diolah, 2022

Sesuai hasil pada Tabel 4, variabel DAU, DAK Fisik dan PAD menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita namun tidak terhadap Angka Harapan Hidup dimana *Adjusted R Square*-nya menunjukkan nilai negatif.

PEMBAHASAN

Uji F dan Koefisien Determinasi

Uji F dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Sesuai dengan hasil Uji F atau Uji Anova dan uji koefisien determinasi pada penelitian ini, Angka Harapan Hidup tidak secara signifikan dipengaruhi oleh gabungan variabel DAU, DAK Fisik dan PAD. Ini menunjukkan bahwa dua jenis dana perimbangan tersebut ditambah PAD sangat kecil pengaruhnya terhadap elemen kesehatan. Kurang maksimalnya penggunaan ketiga sumber dana pembangunan tersebut terutama terhadap sektor kesehatan menjadi salah satu pemicunya. DAU Lebih didominasi belanja pegawai dan operasional perkantoran. Hal ini diperkuat data yang dirilis oleh Bank Indonesia dalam Laporan Perekonomian Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2020 yang menyebutkan realisasi belanja pegawai di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 36,86%, belanja barang dan jasa 24,6% sedangkan belanja modal hanya 17,34% (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, 2021).

Sebaliknya berdasarkan hasil dua metode pengujian tersebut, variable gabungan DAU, DAK Fisik dan PAD memiliki pengaruh signifikan pada dua unsur indeks pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah serta terhadap Pengeluaran Per Kapita yang merupakan unsur pembentuk indeks standar hidup. Hasil ini ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya, dimana PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (Sembiring, 2020). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Saswatata dan Parju (2022) juga menunjukkan bahwa DAU, DAK Fisik, dan PAD mempengaruhi IPM di Kota Semarang secara signifikan.

Uji t

Uji selanjutnya yaitu uji t yang ditujukan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara terpisah terhadap variabel terikat dalam penelitian. Secara parsial hasil uji t memperlihatkan bahwa variabel DAU tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap semua komponen IPM. Hasil serupa dapat dilihat dari penelitian Sarkoro dan Zulfikar (2016), yaitu jika dilihat dari hasil analisis secara parsial DAU dan DAK Fisik periode tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penggunaan DAU di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan barat kurang efektif dalam usaha pembangunan manusia. Hasil penelitian juga menunjukkan hal yang sama atas variabel DAK Fisik. Kurang optimalnya pemerintah daerah dalam penyerapan dana DAK Fisik baik akibat keterlambatan penyampaian persyaratan pencairan DAK Fisik ataupun terbatasnya rekanan yang mau mengerjakan pekerjaan proyek DAK Fisik di bidang kesehatan dan Pendidikan pada daerah-daerah di wilayah Kalimantan Barat yang masih minim infrastruktur. Dari data Kanwil DJPb Prov. Kalbar (2021), jumlah DAU dan DAK Fisik selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,198T untuk DAU dan 873 M untuk DAK Fisik. Penurunan DAK Fisik disebabkan berkurangnya alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat akibat adanya pandemi COVID-19. Umumnya, DAK digunakan sebagai dana belanja pembangunan karena meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan sarana prasarna, seperti rumah sakit, jalan, sekolah, irigasi, dan pasar. DAK digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain seperti pembangunan rumah sakit, pendidikan, jalan, pasar, irigasi, dan air bersih. Dalam bidang pendidikan, DAK ditujukan untuk memperbaiki ruang belajar yang rusak serta pengadaan sarana dan prasarana yang diharapkan mampu memberikan akses, layanan pendidikan berkualitas, peningkatan daya saing dan pemberdayaan potensi daerah (Putra dan Ulupui, 2015).

Grafik 2.
DAU dan DAK Fisik

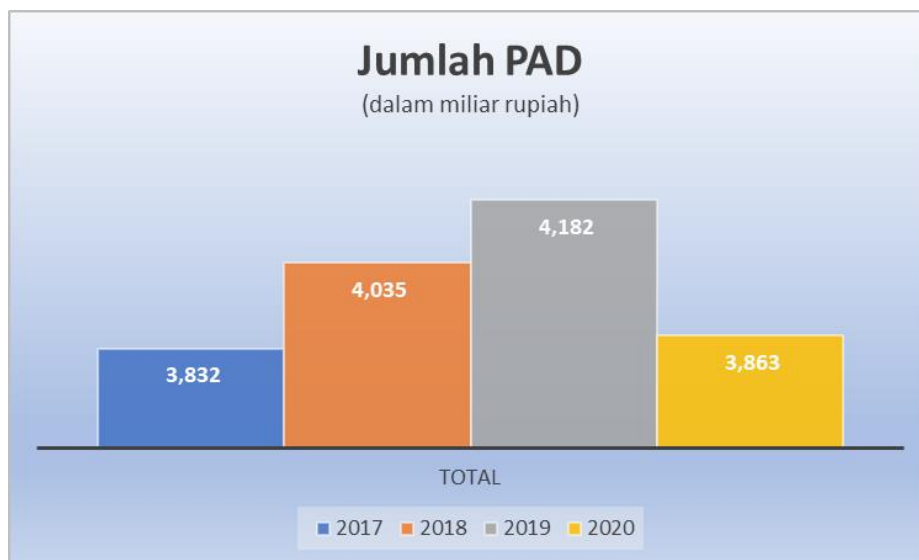


Sumber: Kanwil DJPb Prov. Kalbar, 2021

Sedikit berbeda untuk variabel PAD dimana variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita, namun tidak untuk Angka Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah. Pemanfaatan PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat lebih diprioritaskan pada bantuan biaya sekolah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Program pemberian bantuan beasiswa bagi pelajar di seluruh wilayah Kalimantan Barat, dana BOS, dan bantuan pendidikan lainnya dari hasil pemanfaatan PAD cukup optimal dalam meningkatkan nilai Rata-rata Lama Sekolah di Kalimantan Barat. Penggunaan PAD dalam Program Pemberdayaan UMKM dan pemberian dukungan bagi pengembangan *start up* lokal turut mendorong Pengeluaran Per Kapita masyarakat.

Keterbatasan jumlah PAD menjadikan pembangunan di bidang lainnya kurang berjalan dengan baik. Situasi pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 juga mengakibatkan pencapaian PAD di Provinsi Kalimantan Barat lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Menurut data Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat, PAD tahun 2020 tercatat 3,863 T turun sebesar 319 M dari tahun 2019 sebesar 4,182 T (Kanwil DJPb Prov. Kalbar, 2021).

Grafik 3.
Jumlah Pendapatan Asli Daerah



Sumber: Kanwil DJPb Prov. Kalbar, 2021

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik, sehingga apabila terjadi pertumbuhan ekonomi maka akan berpengaruh terhadap pembangunan manusianya (UNDP, 1996). Selain PAD, IPM juga sering dikaitkan dengan DAU dan DAK Fisik. Jika fasilitas publik dapat terpenuhi maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standart kehidupan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sesuai dengan hasil uji, dapat disimpulkan bahwa DAU tidak menghasilkan pengaruh yang cukup berarti terhadap Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita. Pengelolaan DAU di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang berprioritas pada belanja pegawai dan belanja terkait tupoksi pemerintahan menjadi salah satu sebabnya. Seperti halnya DAU, penggunaan DAK Fisik juga tidak mempunyai signifikansi pengaruh atas semua indeks pembentuk IPM. Optimalisasi pemanfaatan DAK Fisik masih perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PAD mempengaruhi Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita tetapi sebaliknya untuk Angka Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah. Jumlah PAD yang terbatas menyebabkan pembangunan di berbagai sektor tidak merata.

Saran

Saran yang bisa peneliti sampaikan antara lain menyempurnakan pengelolaan DAU dengan cara meningkatkan efisiensi belanja pegawai selain gaji dan tunjangan serta menambah porsi belanja yang terkait bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan DAK Fisik melalui proyek-proyek yang berkaitan dengan elemen-elemen pembangunan manusia baik kesehatan, pendidikan dan pengeluaran masyarakat dan membuat strategi-strategi peningkatan PAD untuk membiayai pembangunan agar lebih baik dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah dan Widiyaningsih, V. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Simposium Nasional Akuntansi 17 Lombok 24-27 September 2014.
- Badrudin, R., & Khasanah, M. (2012). Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Buletin Ekonomi*, Vol. 9 (No. 1): 1-82.
- BPS. (2022). Indeks Pembangunan Manusia 2011-2022. www.bps.go.id. Diakses 3 Mei 2022.
- BPS Kabupaten Sintang. (2021). Statistik daerah Kabupaten Sintang 2021. <https://sintangkab.bps.go.id/>. Diakses 1 Mei 2022
- BPS Provinsi Kalbar. (2021). Provinsi Kalimantan Barat dalam angka. <https://kalbar.bps.go.id/>. Diakses 4 Mei 2022.
- de Fretes, P. N. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi Fe. UN PGRI Kediri* 2(2).
- DJPB. (2021) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. <https://djp.kemenkeu.go.id/>. Diakses 4 Mei 2022.
- Harjito, Y., Putra Surya Nugraha, G., dan Setia Budi Surakarta, U. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi* 5(1): 19-28.
- Hobrouw, Y.A. dan Suaryana, I.G. R.A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia. *Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi*, 31(2): 401- 413.
- JDIH. 2017. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses 5 Mei 2022.
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. (2021). Laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Barat Februari 2021. <http://www.bi.go.id/id>. Diakses 3 Mei 2022.
- Kanwil DJPb Prov. Kalbar (2021). Pendapatan pemda 2015-2020 audited. <https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/kalbar/id>. Diakses 7 Mei 2022.
- Lestari, A., Dali, N., Abdullah, M. 2016. Pengaruh Pengaruh Dana Alokasi Umum (DaAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* 1(2): 44-55.
- Mangkoesobroto. (1993). *Ekonomi publik*. Edisi III. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Patadang, T., Rotinsulu, T., Rorong, I. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Minahasa Tenggara Dengan Pengeluaran Di Bidang Kesehatan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 22 (2):132-149.
- Putra, Putu Gede Mahendra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. 2015. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11(3): 863 -877.
- Putri, Z. E. (2015). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 5(2):173-186.
- Riviando, A., dan Agustin, H. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening (studi empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tahun 2015-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 1-17.

- Santosa, P. B., Retno, dan Rahayu, F. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri. *Jurnal Dinamika Pembangunan* 2(1): 9-18.
- Sarkoro, H., dan Zulfikar. (2016). Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1(1): 54-63.
- Saswatata, S. dan Parju. 2022. Pengaruh PAD, DAU, DAN DAK Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*. 3(1): 17-28.
- Sembiring, T. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara (periode 2016-2018). *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(1), 77-92.
- Setiowati, I., Ismail, T., dan Kobir, M. A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Pemerintah Daerah Lingkup KPPN Serang. 7(1): 1770-1790.
- Wulan Sari, S., dan Halim, A. (2018). Evaluation Of State Budget Disbursement For Physical Special Allocation Fund Of 2017 (A Study Of Magelang And Boyolali Regency Governments). *Accounting and Business Information System Journal*. 6(4): 1-11.